



PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RAISA FAJRIWINARNI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir “Perlakuan Akuntansi Persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

Raisa Fajriwinarni
NIM. J3N119188



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

RAISA FAJRIWINARNI. Perlakuan Akuntansi Persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. *Inventory Accounting Treatment at BPK RI Representative of Banten Province*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan yang berada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berperan penting untuk melakukan kegiatan operasional kantor dan pemakaian obat-obatan untuk kesehatan para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Perlakuan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Tujuan dari pembuatan laporan tugas akhir ini adalah memberikan informasi mengenai klasifikasi persediaan, menguraikan perolehan persediaan, menguraikan pengakuan persediaan, menguraikan pengukuran persediaan, menguraikan perlakuan pencatatan persediaan, menguraikan penghapusan persediaan, memberikan informasi penyajian dan pengungkapan persediaan, memberikan informasi perbandingan ketentuan kebijakan akuntansi persediaan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan, dan memberikan informasi kendali/*control* terhadap persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan studi pustaka.

Klasifikasi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten yaitu persediaan barang habis pakai dan persediaan barang tak habis pakai. Perolehan persediaan diperoleh dengan cara pembelian, menggunakan dua metode pembayaran yaitu pembayaran menggunakan UP/GU dan LS. Pengakuan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten diakui ketika persediaan telah dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pengukuran persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) berdasarkan nilai kuitansi. Nilai kuitansi jika termasuk objek pajak, maka nilai pembelian ditambah dengan pajak. Perlakuan pencatatan persediaan dibantu dengan aplikasi yang bernama "Aplikasi Persediaan" dan pencatatan menggunakan dua basis yaitu basis akrual dan basis kas. Penyajian persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten disajikan di Neraca dan pengungkapan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan ketentuan kebijakan akuntansi persediaan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten sudah sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Kata Kunci: Persediaan, Perlakuan Akuntansi, PMK Nomor 234/PMK.05/2020, PSAP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

RAISA FAJRIWINARNI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Perlakuan Akuntansi Persediaan pada BPK RI Perwakilan
Provinsi Banten

Nama : Raisa Fajriwinarni
NIM : J3N119188

Disetujui oleh

Pembimbing :
Mela Nurdialy, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian: 25 Mei 2022

Tanggal Lulus: 10 8 JUL 2022

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.